



Integralis - Moderat: Potret Politik Mohammad Natsir

Fajar Nursahid

Universitas Bakrie, Jakarta
fajar.nursahid@bakrie.ac.id

Ahmad Khoirul Fata

IAIN Sultan Amai Gorontalo
cakfata@gmail.com

Abstract : *Some scholars conclude that someone who believes in the unity of religion-state tends to have resistance to modern Western political ideas and institutions. This view is rooted in the history of the emergence of modern political concepts and institutions which are the antithesis of medieval European political institutions, namely theocracy. As opposed to the absolutism of the Church of the Middle Ages, modern political ideas make all that is colored religious-political integration into a negative. This blurry picture has also hit the Islamic world to this day. By using a historical approach, this paper raises the political ideas and actions of the General Chairman of the Masyumi Party, Mohammad Natsir. He is a prominent Islamic political figure who carries the idea of state-religion integration. This article focuses on discussing the construct of Natsir's religion-state integration paradigm, and Natsir's political attitude towards Western political concepts. This article finds that Natsir does believe in the necessity of unifying religion with politics, however, he can accept modern Western political ideas and institutions. More than that, Natsir actually rejected absolute political institutions such as theocracy or monarchy. Thus, it can be concluded that the proponents of the idea of state-religion integration are not always anti-modern ideas (such as democracy) or support an absolute political system such as theocracy. Natsir became clear evidence of an integralist as well as moderate.*

Keywords : *Mohammad Natsir; Integralis; Modernis; Moderat; politik*

Abstrak : *Sebagian sarjana menyimpulkan bahwa seseorang yang berpandangan penyatuan agama-negara cenderung memiliki resistensi terhadap ide-ide dan institusi politik Barat modern. Pandangan seperti ini berakar pada sejarah kemunculan konsep dan institusi politik modern yang merupakan antitesis dari lembaga politik Eropa Abad Pertengahan, yaitu teokrasi. Sebagai lawan dari absolutisme Gereja Abad Pertengahan, ide-ide politik modern menjadikan semua yang berwarna integrasi agama-politik menjadi negatif. Gambaran buram ini juga menerpa Dunia Islam hingga kini. Dengan menggunakan pendekatan sejarah tulisan ini mengangkat gagasan dan aksi politik Ketua Umum Partai Masyumi, Mohammad Natsir. Dia merupakan tokoh politik Islam terkemuka yang mengusung ide integrasi agama-negara. Artikel ini fokus pada membahas tentang konstruk paradigma integrasi agama-negara Natsir, dan sikap politik Natsir terhadap konsep politik Barat. Artikel ini menemukan bahwa Natsir memang meyakini keharusan penyatuan agama dengan politik, namun demikian, dia bisa menerima ide-ide dan lembaga politik Barat modern. Lebih dari itu, Natsir justru menolak lembaga politik absolut semacam teokrasi atau monarki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengusung gagasan integrasi agama-negara tidak selalu bersikap anti terhadap ide-ide modern (seperti demokrasi) atau mendukung sistem politik absolut semacam teokrasi. Natsir menjadi bukti nyata seorang integralis sekaligus moderat.*

Kata Kunci : *Mohammad Natsir; Integralis; Modernis; Moderat; politik*

A. Pendahuluan

Gagasan tentang ketidakterpisahan politik dan kenegaraan dengan agama sering dikaitkan dengan kekuasaan yang absolut dan anti demokrasi. Kesan seperti ini tidak bisa dilepaskan dari konteks kesejarahan Eropa Abad Pertengahan di mana kekuasaan politik berada di bawah kendali Gereja. Teokratisme Gereja ini telah menjerumuskan Eropa dalam jurang kemunduran sehingga dikenal sebagai Zaman Kegelapan (*The Dark Age*). Sebagai antitesis dari era ini, muncullah Renaisans yang melahirkan zaman modern.¹

Zaman Modern membuat banyak hal yang berbau Abad Pertengahan dipandang negatif, termasuk teokrasi dan gagasan tentang integralisme agama-negara. Tidak hanya di Eropa, kesan negatif terhadap konsep integrasi agama-negara juga berkembang ke Dunia Islam seiring

¹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

dengan penyebaran ide-ide politik Barat Modern ke “dunia lain” melalui kolonialisme dan hegemoni budaya-ilmu pengetahuan.² Setidaknya tulisan Masykuri Abdillah mewakili gambaran negatif tentang integralisme agama-negara itu:

“Orientasi kelompok ini pada agama lebih besar daripada orientasinya pada wawasan kebangsaan, sehingga ia akan bisa menimbulkan dilema jika dihadapkan pada realitas bangsa yang majemuk. Apalagi secara umum kelompok ini memiliki sikap yang absolutis dan eksklusif dalam beragama, di samping kadang-kadang melakukan politisasi agama untuk mendukung cita-cita mereka”³

Namun apakah kesan seperti itu benar adanya? Apakah seseorang (atau kelompok) tidak bisa menjadi pengusung gagasan integrasi agama-negara dan, di saat bersamaan, dia juga seorang modernis yang menolak kekuasaan absolut semacam teokrasi?

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan inilah penulis mencoba menyajikan fakta yang berbeda dari kesan yang ada tersebut. Dengan pendekatan sejarah tulisan ini hendak menunjukkan bahwa seseorang bisa memiliki dan memperjuangkan ide integrasi agama-negara, dan di saat bersamaan, dia pun bisa menjadi seorang modernis dan moderat yang terbuka terhadap ide-ide dan kelembagaan politik modern. Untuk tujuan ini penulis akan mengambil kasus tokoh modernis-moderat pengusung ide integrasi agama-negara di Indonesia, yaitu Mohammad Natsir.

Pemilihan Natsir sebagai fokus kajian disebabkan oleh kenyataan bahwa ia adalah politisi Islam modernis yang cemerlang pada zamannya. Dia adalah sahabat sekaligus seteru pemikiran Soekarno. Ada masa-masa di mana mereka “berbulan madu” seiring sejalan dalam pemikiran dan tindakan politik, tetapi sering pula berada di simpangan terjauh karena kukuh memegang prinsip masing-masing, sebagaimana tergambarkan pada perdebatan keduanya tentang hubungan Islam dengan negara di era pra kemerdekaan, atau pada sidang-sidang perumusan konsep dasar negara

² Ahmad Khoirul Fata and Siti Mahmudah Noorhayati, “Sekularisme Dan Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer,” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 20, no. 2 (2016): 215–28, <https://doi.org/10.29300/MADANIA.V20I2.180>.

³ Masykuri Abdillah, “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 249.

Indonesia di Konstituante.⁴ Natsir mewakili kelompok Islam modernis, sementara Soekarno mewakili kaum nasionalis sekuler. Tabrakan ide antar kedua tokoh bangsa ini sedemikian runcing tetapi sangat berkualitas dan mengilhami perdebatan konsep bernegara dalam khasanah kajian politik kontemporer di antara para pendukungnya hingga saat ini.

Dari perjalanan politik Natsir yang penuh dinamika inilah Emy Setyaningsih menganggapnya sebagai sosok yang kontradiktif.⁵ Namun tidak demikian menurut Pepen Irpan Fauzan. Baginya, perubahan gagasan dan sikap Natsir bukanlah sebuah kontradiksi, tetapi lebih sebagai respons terhadap kondisi politik yang berbeda-beda.⁶

Sebagai seorang pemikir Islam modernis, Mohammad Natsir dikenal memiliki pandangan yang visioner dan progresif mengenai Islam dan politik, lebih khusus lagi mengenai hubungan Islam dan negara.⁷ Sikap politiknya yang jernih dan tegas, tidak abu-abu, menjadikan kita mudah menarik garis pemikiran Natsir, karena relatif kontras dengan pemikir lainnya yang kontra. Sebagai tokoh utama di Masyumi, gagasan-gagasan politik Natsir pun memberi pengaruh yang dominan dibanding tokoh-tokoh lainnya.⁸ Salah satu gagasan politik Natsir yang progresif adalah konsepnya tentang teistik-demokrasi sebagai sebuah upaya mensintesis Islam dalam demokrasi modern sebagaimana yang diungkap Indah Muliati.⁹

Ketokohan Natsir tidak hanya di Indonesia, reputasinya pun diakui oleh dunia Islam internasional karena ia pernah menjabat presiden Liga Muslim se-Dunia (*World Moslem Congress*), ketua Dewan Mesjid se-Dunia, dan anggota Dewan Eksekutif Rabithah Alam Islami yang berpusat di Makkah. Pengakuan juga datang dari komunitas akademik seperti Universitas Islam Libanon yang menganugerahi Natsir gelar *doctor honoris*

⁴ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir* (Jakarta: Teraju, 2002).

⁵ Emi Setyaningsih, "Perjuangan Dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993)," *Jurnal Tapis* 16, no. 2 (2016): 73–94.

⁶ Pepen Irpan Fauzan, *Negara Pancasila Vis a Vis Negara Islam: Pemikiran Politik M Natsir Dan M Isa Anshary (1945-1960)* (Garut: STAIPI Garut Press, 2019).

⁷ Suyitno Amin, "Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dari Perspektif Pemikiran Politik Islam," *Intizar* 21, no. 225–246 (2015).

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 191.

⁹ Indah Muliati, "Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam," *Tingkap* 11, no. 2 (2015): 129–39.

causa di bidang politik Islam pada tahun 1967. Sementara Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Saint Teknologi Malaysia menganugerahinya gelar doktor kehormatan dalam bidang Pemikiran Islam pada tahun 1991. Atas jasa-jasa Natsir, Pemerintah Indonesia pun menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2008.¹⁰

Meski politik Natsir menjadi topik utama dalam tulisan ini, namun tidak semua hal terkait dengannya dibahas di dalamnya. Tulisan ini membatasi diri pada pemikiran Natsir tentang integrasi agama-negara sebagai kerangka pikir yang memberikan arah baginya dalam menyikapi ide-ide politik Barat modern dan memandunya dalam menjalankan kehidupan politik praktis.

B. Dirkursus Agama-Negara Dalam Islam Modern

Wacana tentang hubungan agama dan negara telah menarik perhatian para pemikir Islam dari dulu hingga kini. Diskusi mengenai tema ini menjadi ramai setelah Dunia Islam bersinggungan dengan ide-ide politik Barat modern. Kemajuan Dunia Barat yang berbarengan dengan kemerosotan Dunia Islam, dan diikuti dengan kolonialisme Barat atas Dunia Islam membuat umat Islam kaget dan mempertanyakan banyak hal dalam tradisi keagamaannya. Konsep dan lembaga politik Islam lama (khilafah) pun turut digugat relevansinya di zaman modern.

Gugatan seperti ini telah muncul sejak abad ke 19 yang ditandai dengan munculnya berbagai gerakan nasionalisme di wilayah Utsmani, khususnya di kawasan Arabia. Pasca penghapusan kekhilafahan Turki Utsmani di paro awal abad ke 20, pertanyaan seputar tema itu pun menjadi semakin memanas. Beberapa kalangan mencoba menghidupkan kembali keberadaan khilafah sebagai lembaga politik Islam yang pernah mapan sebelumnya. Namun realitas Dunia Islam yang masih dicengkeram oleh kolonialisme dan menguatnya gagasan kebangsaan di tengah-tengah umat Islam menjadikan keinginan itu sekedar mimpi belaka. Politik Islam pun mengalami transformasi yang radikal dengan segala riuh rendah perdebatannya sehingga Azyumardi Azra pun menyebut di zaman ini sebagai era terjadinya krisis terberat dalam sejarah Islam.¹¹

¹⁰ Tim Tempo, *Natsir: Politik Santun Di Antara Dua Rezim* (Jakarta: Tempo & KPG, 2011), 118–20.

¹¹ Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi* (Jakarta: Prenada & PPIM UIN Jakarta, 2016), 23.

Setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi pemikiran politik Islam kontemporer. Pertama kemunduran dan kerapuhan Dunia Islam oleh berbagai sebab yang berasal dari umat Islam sendiri. Sebab ini pun melahirkan gerakan-gerakan pembaharuan di seantero Dunia Islam. Kedua, Rongrongan Barat terhadap keutuhan politik Dunia Islam dalam bentuk penjajahan. Di abad ke 19 dan awal abad ke 20, sebagian besar negara-negara Islam menjadi wilayah jajahan negara-negara Barat, khususnya Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda. Ketiga, ketika Dunia Islam mengalami kerapuhan, Barat sedang mengalami pasang naik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan ekonomi.¹²

Di tengah keadaan seperti ini para pemikir Muslim pun mencoba merumuskan ulang berbagai konsep politik Islam agar tetap sesuai dengan keadaan kekinian. Meminjam perspektif Munawir Sjadzali, secara teoritis pemikiran Islam tentang kenegaraan di era modern dapat digolongkan ke dalam tiga aliran. Pertama, aliran yang berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur sangkutan hubungan antara manusia dan Tuhan. Lebih dari itu, Islam adalah sebuah agama sempurna dan lengkap yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia di dalamnya, termasuk kehidupan bernegara. Menurut aliran ini Islam mengandung sistem yang lengkap termasuk sistem kenegaraan dan politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaklah kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, tidak perlu mengikuti sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan empat *al-Khulafa al-Rashidun*. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah Rasyid Ridha (1865-1935), Hasan al-Banna (1906-1949), serta Abul A'la al-Maududi (1903-1979).¹³

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam hanya agama dalam pengertian atau perspektif Barat yang tidak ada hubungan dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul biasa seperti rasul-rasul lainnya sebagai pembawa risalah untuk mengajak manusia berbudi luhur. Dalam perspektif kedua ini, Allah SWT tidak pernah bermaksud mengutus Nabi Muhammad Saw untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh aliran ini antara lain adalah Ali Abdul Raziq, Thaha Husein di Mesir dan Mustafa Kamal atau Kemal

¹² Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.

¹³ *Ibid*.

Attaturk di Turki. Merekalah bapak sekularisme Islam yang antara lain sering dipuja-puji oleh para pengikutnya termasuk di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia sampai hari ini.¹⁴

Sementara itu, aliran ketiga adalah kelompok yang menolak pendapat aliran pertama dan kedua dengan argumentasi lain bahwa Islam meskipun Islam tidak mengatur sistem kenegaraan yang lengkap, namun Islam mempunyai seperangkat nilai-nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokohnya paling menonjol adalah Mohammad Husein Haikal (lahir 1888) pengarang kitab *Hayatu Muhammad* dan *Fi Manzil al-Wahyi*. Tokoh lain adalah penganut pemikiran ini adalah Fazlur Rahman (1919-1988). Khusus Fazlur Rahman bahkan menekankan bahwa kekuasaan politik penting untuk melaksanakan kehendak Tuhan serta syariat adalah undang-undang dasar umat Islam.¹⁵

Senada dengan itu, Masykuri Abdillah menyebut aliran pertama sebagai kelompok yang berorientasi integrasi agama dengan negara (*integrated*), aliran kedua sebagai sekularistik, dan yang ketiga adalah aliran *intersectional* yang meyakini adanya persinggungan antara agama dengan negara. Di sini Abdillah melihat agama dan politik sebagai dua lembaga yang berbeda namun memiliki titik singgung di aspek-aspek tertentu dan titik pisah di beberapa aspek lainnya. Kategori ketiga ini agak berbeda dengan Sjadzali yang menganggap Islam sebagai seperangkat nilai-nilai yang memberikan warna pada politik kenegaraan.¹⁶

Meski ketiga orientasi ini memiliki pandangan yang berbeda, bahkan bertentangan, namun Sjadzali melihat ketiga-tiganya sama-sama berkeinginan untuk kembali ke Islam yang murni dan kafah. Namun demikian, Sjadzali juga melihat adanya beberapa pemikir Islam yang tidak menyajikan gagasan tentang sistem politik Islam, melainkan konsepsi perjuangan politik umat Islam menghadapi penguasa zalim dan kolonialisme.¹⁷

Dalam konteks tiga kategori Sadjali tersebut maka pemikiran Mohammad Natsir dapat dikategorikan ke dalam aliran ketiga: bagaimana nilai-nilai Islam ingin diterapkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdillah, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi."

¹⁷ Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.

bernegara, yang itu mengilhami pemikiran politik Natsir sebagai cikal bakal pemikiran politik Islam modernis di Indonesia. Oleh karena itu, struktur pembahasan dalam pemaparan tulisan ini juga akan fokus --atau setidaknya memberi porsi yang lebih banyak kepada aliran ketiga, dengan meminjam perspektif Natsir sebagai proksi aliran politik Islam modernis di Indonesia.

C. Integrasi Agama-Negara: Paradigma Politik Natsir

Mohammad Natsir adalah seorang yang generalis. Kita mengenalnya sebagai ulama, intelektual, pendidik, sekaligus politisi. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran Natsir bagi Indonesia pun sangat beragam mulai dari pendidikan, dakwah Islam, hingga politik kenegaraan. Namun demikian, nilai-nilai keislaman menjadi dasar dan ciri yang menonjol pada semua gagasan dan pemikiran Natsir, baik di bidang pendidikan atau pun politik.

Islam politik di Indonesia sering dinisbatkan dengan pemikiran Natsir. Sebagai seorang bekas ketua Masyumi, Natsir adalah seorang reformis dan sangat terpengaruh oleh A. Hasan yang dikenal sebagai fundamentalis. Namun demikian, berbeda dengan gurunya itu, Natsir sangat terbuka pada ide-ide modernisme Barat. Meskipun warna keagamaan dalam pemikirannya sangat kental, tetapi ia juga seorang penganjur kemajuan, stabilitas, dan toleransi. Natsir juga berbeda dengan rekannya di Persis dan Masyumi, Isa Anshary. Meski sama-sama memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara, namun ide-ide Isa Anshary terasa lebih keras dan kaku dibanding Natsir.¹⁸ Kekhasan seperti itu tidak lepas dari pandangan dasarnya tentang politik yang menjadi pondasi bagi gagasan dan aksi-aksi politiknya.

Secara paradigmatik pandangan dasar politik Natsir dibangun atas kaidah kekafahan Islam sebagai sumber nilai dalam politik. Natsir menganut pandangan kekafahan Islam sebagai pandangan dunia (*worldview*). Baginya, Islam adalah agama yang mencakup semua aspek: dunia dan akhirat, privat dan publik. Oleh karena itu, dalam pandangan Natsir, agama (Islam) tidak dapat dipisahkan dari negara. Prinsip ini menjadi dasar pemikiran (paradigma) politik yang dikembangkan Natsir. Menurutnya, kaum Muslimin memiliki falsafah hidup atau ideologi sebagaimana pula

¹⁸ Pepen Irpan Fauzan and Ahmad Khoirul Fata, "Portraying Political Polarization in Persatuan Islam in the Case of Mohamad Natsir Vs Isa Anshary," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (2019): 78, <https://doi.org/10.30821/jcims.v3i2.5589>.

Kristen, Fasis, atau Komunis pun memilikinya. Dasar ideologi Islam menurut Natsir adalah ketundukkan yang mutlak manusia kepada Allah, sebagaimana ayat Al-Qur'an: *"Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku"* (Q.S. Ad-Dzaariyat [51]: 56). Ini menunjukkan bahwa cita-cita hidup seorang Muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai predikat "hamba Allah" tersebut, jelas Natsir, Allah telah memberikan aturan-aturan kepada manusia melalui prinsip-prinsip *muamalah*, termasuk dalam urusan kenegaraan. Dengan demikian, menurut Natsir, Islam adalah *"al-dien wa al-dawlah"*; Islam sebagai "dien" (agama) sekaligus "daulah" (negara).¹⁹

Pandangan Natsir di atas menggambarkan bahwa agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti shalat dan puasa semata-mata, akan tetapi meliputi semua kaidah-kaidah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, untuk menjaga supaya aturan-aturan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan suatu kekuasaan dalam negara. Kekuasaan negara itu, tegas Natsir, harus dilaksanakan berdasar pada prinsip-prinsip agama, sebagaimana Rasulullah SAW berpesan bahwa sesungguhnya Allah-lah pemegang dengan kekuasaan penguasa.²⁰

Pandangan di atas menegaskan hubungan Islam dan negara secara integral, bahkan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral. Agama diperlukan dalam kekuasaan negara sehingga tata aturan kenegaraan dapat diselenggarakan secara etis dan bermoral.²¹

D. Respons Natsir Terhadap Ide Politik Barat Modern

1. Menerima Demokrasi

Pandangan Natsir yang modern tercermin dari penerimaannya terhadap demokrasi yang muncul dari filsafat kebebasan (liberalism) Barat.

¹⁹ Mohammad Natsir, *Capita Selecta I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973); Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*.

²⁰ *Ibid.*

²¹ M Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam," *Ulumul Qur'an* 4, no. 2 (1993): 6.

Bagi Natsir, Islam memberikan hak kepada rakyat untuk memberikan kritik dan teguran kepada pemerintah yang dzalim, yaitu:

“(pemerintah) yang tidak memperdulikan urusan rakyat, membiarkan rakyat dalam kondisi bodoh dan dungu, tidak mencukupkan alat-alat yang diperlukan untuk kemajuan untuk tidak tertinggal dari negara-negara lain; dan yang kepala negaranya menindas rakyat dengan memakai Islam dan ibadah-ibadah sebagai kedok; sedangkan mereka melakukan kemaksiatan dan memberikan takhayul dan khurofat merajalela.”²²

Iniilah pangkal pandangan Natsir terhadap demokrasi, bagaimana masyarakat memiliki *banding* yang setara dengan pemerintah atau negara, bisa bersikap kritis terhadap kekuasaan. Terhadap berbagai kedzaliman yang terjadi ini, jika kritik dan teguran tidak mempan, kata Natsir, perlu dilawan dengan kekuatan dan kekerasan. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran terhadap pemimpin yang dzalim.²³

Natsir mengakui demokrasi itu baik, tetapi sistem kenegaraan Islam tidaklah mengandalkan semua urusannya kepada instrumen demokrasi, sebab demokrasi tidaklah bebas nilai. Untuk itu, baginya, menerima demokrasi dengan tetap bersikap yang hati-hati dan kritis adalah pilihan yang lebih baik. Menurut Natsir, Islam adalah suatu pengertian, suatu paham yang memiliki prinsip dan sifat-sifatnya sendiri. “Islam tak usah demokrasi 100%, bukan pula otokrasi 100%, Islam itu ya Islam,” ujarnya.²⁴

Pandangan ini menunjukkan sikap tengah terhadap demokrasi diperlukan. Natsir tidak menolak secara apriori konsepsi demokrasi karena “kebaratannya” tetapi juga tidak menerimanya mentah-mentah. Di titik inilah Natsir menawarkan konsep demokrasi teistik sebagai solusi bagi demokrasi yang sesuai dengan Islam.²⁵

2. Menolak Sekularisme

Bagi Natsir, karena Islam bukanlah sekedar agama tetapi juga sekaligus peradaban yang komplit, pemisahan agama dari negara tidaklah

²² Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Bandung: Segarsy, 2014), 87–88.

²³ *Ibid.*

²⁴ Natsir, *Capita Selecta I*.

²⁵ Fauzan and Fata, “Portraying Political Polarization in Persatuan Islam in the Case of Mohamad Natsir Vs Isa Anshari.”

relevan. Menurutnya, nilai-nilai Islam yang universal tidak dapat dipisahkan dari ide pembentukan sebuah negara. Oleh karena itulah, Natsir menolak secara tegas pemisahan urusan agama dan negara. Pengasingan agama dari negara sebagaimana diusung oleh para sekularis melalui ide sekularisme sangat ditentang oleh Natsir.²⁶

Penolakan Natsir terhadap sekularisme didasari pada pemikiran bahwa ideologi ini mengandung paham, tujuan, dan sikap yang terbatas pada keduniaan saja. Ia tidak mengenal akhirat dan Tuhan. Oleh karena itu, sekularisme tidak dapat menjawab (dan memang tidak merasa perlu menjawab) arti “penghidupan”. Akibatnya, kaum sekularis cenderung mengalami kerontokan ruhani oleh karena pada dasarnya manusia membutuhkan sebuah pegangan hidup yang dasarnya tidak berubah. Lebih dari itu Natsir melihat, salah satu bahaya terpenting sekularisme adalah karena ia telah mendegradasi sumber nilai-nilai hidup manusia dari taraf ketuhanan kepada taraf kemasyarakatan semata-mata.²⁷

Natsir mencontohkan, dalam menjelaskan ajaran mengenai kasih sayang sesama manusia sekulerisme tidak mendasarkan penjelasannya kepada wahyu Ilahi, tetapi didasari oleh keinsyafan dan penghidupan masyarakat semata-mata. Menurut kaum sekularis, jika sesama manusia saling hidup damai dan tolong-menolong, tentu akan menguntungkan semua pihak. Pandangan ini dinilai berbahaya karena telah menurunkan nilai-nilai dan kepercayaan ke taraf perbuatan manusia dalam dinamika masyarakat semata-mata. Oleh karena itu, di mata Natsir, pandangan ini mengalami kemerosotan; manusia merasa lebih tinggi dari nilai-nilai itu dan menganggap nilai-nilai tersebut bukan sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi, tetapi sekedar “sebagai alat semata-mata karena semua itu adalah hasil ciptaan manusia itu sendiri”.²⁸

3. Manolak Teokrasi

Kendati tegas menyerukan penyatuan Islam dan negara, pandangan Natsir mengenai sistem kenegaraan sangatlah modern. Menurutnya, sistem kenegaraan dan politik Islam tidak harus sebangun dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah atau para sahabat sesudahnya. Islam dapat menjadi ruh

²⁶ Yusril Ihza Mahendra, “Modernisasi Islam Dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir,” *Islamika* Januari-Ma, no. 3 (1994): 136.

²⁷ Herbert Feith and Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1995), 213–16.

²⁸ *Ibid.*

negara modern sesuai dengan perkembangan zaman karena situasi dan tantangan yang dihadapi juga berbeda.

Dalam memberikan gambaran tentang negara ideal sebagai cita-cita yang hendak dicapai Indonesia merdeka, Natsir justru tidak membayangkan Arab Saudi, Pakistan, Iran, atau negara Muslim lainnya di Timur Tengah. Natsir, dan juga para pemikir Islam modernis yang tergabung dalam Masyumi saat itu, justru merujuk negara Barat sebagai model negara ideal untuk ditiru untuk pembentukan negara Islam Indonesia. Natsir membayangkan Inggris yang religius sebagai model negara Islam yang ideal. Sementara koleganya, Abu Hanifah, membayangkan Belanda dan Swiss sebagai model negara yang patut ditiru untuk pembentukan negara Islam Indonesia. Preferensi terhadap negara-negara Barat sebagai model ketimbang negara-negara Islam karena negara-negara tersebut dianggap telah berhasil menggabungkan pluralitas agama, kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik sehingga cocok ditiru menjadi bangun negara ideal bagi Indonesia.²⁹

Berangkat dari pandangan di atas, meskipun menolak ide sekularisme, Natsir bukanlah penganut teokrasi. Bagi Natsir, pemisahan agama dan negara dalam Islam adalah sesuatu yang mustahil, tetapi keinginan untuk mempersatukan agama dan negara harus dilakukan dengan cara-cara demokratis. Penyatuan agama dan negara tidak serta merta berarti teokrasi. Natsir dan koleganya di Masyumi percaya bahwa negara-negara seperti Inggris dan Amerika adalah negara-negara demokratis tapi tetap memasukkan beberapa unsur agama dalam urusan negara. Dengan demikian, adalah sangat mungkin jika suatu negara menerima penyatuan dengan agama tapi tetap demokratis.³⁰

Gagasan persatuan agama dan negara yang ditawarkan Natsir tidak mengandaikan bentuk dan sistem politik tertentu, karena memang Rasulullah tidak memberi penjelasan detail tentang negara. Negara adalah sebuah fakta yang tidak bisa ditolak oleh karena dengan atau tanpa Islam negara bisa berdiri. Menurut Natsir, Islam datang membawa peraturan-peraturan tertentu untuk mengatur negara supaya negara menjadi kuat. Negara bisa menjadi *wasilah* (sarana) yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang terhimpun di dalamnya. Dengan demikian,

²⁹ Luthfie Assyaukanie, *Ideologi Islam Dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 83.

³⁰ *Ibid.*

negara bukanlah tujuan akhir Islam, melainkan hanya alat untuk merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan "kesempurnaan berlakunya undang-undang Illahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri (sebagai individu) ataupun sebagai anggota masyarakat".³¹ Oleh karena negara hanyalah sekedar alat, tak jadi soal apapun namanya; yang penting negara dapat mewujudkan suasana masyarakat tersebut.³²

Pandangan Natsir tersebut, yang menyatakan bahwa negara bukanlah tujuan akhir seorang Muslim tetapi hanyalah alat untuk mencapai tujuan, menarik perhatian tokoh muda pemikir liberal, Luthfi Assyaukanie. Menurutnya, ini adalah pandangan politik yang progresif dari seorang pemikir Islam pada jamannya. Implikasi dari pernyataan bahwa negara bukan tujuan akhir, menurut Assyaukanie, adalah adanya fleksibilitas konsep negara. Namun demikian Natsir menekankan bahwa fleksibilitas itu harus tetap didasarkan pada koridor Ilahiah. Hal ini berbeda dengan Assyaukanie --dan juga para pemikir liberal lainnya pada umumnya-- yang berpandangan bahwa tujuan negara musti dicapai melalui cara-cara rasional, dengan cara memberi pilihan dan peran kepada rakyat seluas-luasnya untuk menentukan bentuk dan sistem politik terbaik, termasuk pilihan pilihan politik yang sekular.³³

4. Menentang Komunisme

Meski bisa menerima ide-ide politik Barat semacam demokrasi, namun tidak semuanya diterima. Salah satu ideologi politik Barat yang tegas ditolak Natsir dan koleganya di Masyumi adalah paham komunisme. Sikap tegas menolak komunisme tampak pada sikap partai Masyumi yang sangat keras menentang kebijakan politik Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang dijalankan Presiden Soekarno. Nasakom adalah konsep politik Presiden Sukarno, yang ingin menyatukan tiga ideologi politik besar di Indonesia saat itu- Nasionalisme, Agama, dan Komunisme - ke dalam koalisi pemerintahan.

³¹ Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*.

³² Lihat Abibullah Djaini, "Pengantar," in *Pemikiran Dan Perjuangan Muhammad Natsir*, ed. Anwar Harjono (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

³³ Assyaukanie, *Ideologi Islam Dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia*.

Kebijakan ini lahir dilatarbelakangi oleh kritik Soekarno terhadap praktik demokrasi parlementer yang berujung pada persetujuan politik yang tak berkesudahan yang berlawanan dengan gagasan Indonesia sebagai sebuah negara yang harmonis. Oleh karena itu dia lalu mengusulkan campuran tiga unsur politik utama ada masa itu yang terdiri dari kelompok nasionalis, kaum agama dan komunis ke dalam suatu pemerintahan yang kooperatif menjadi pemerintah koperasi bernama Nasakom dalam Demokrasi Terpimpin pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Tentu saja kebijakan ini mendapat tentangan yang serius dari kekuatan politik Islam, terutama dari kelompok Islam modernis yang diwakili Masyumi dan Muhammadiyah. Sebabnya, selain ide komunisme tidak bisa disatukan secara “harmonis” dengan agama, juga karena partai komunis saat itu (PKI/ Partai Komunis Indonesia) bersama organisasi-organisasi sayapnya nyata-nyata kerap melakukan provokasi dan agitasi terhadap ummat Islam sehingga hubungan politik terhadap kedua kekuatan politik ini merenggang, dan bahkan tuntutan politiknya jelas: meminta agar PKI dibubarkan. Sementara unsur Islam lain dari kalangan NU relatif akomodatif terhadap gagasan politik Nasakom Presiden Soekarno, dengan alasan keyakinan dan kemampuan mereka untuk berkiprah dalam menghadapi komunisme.³⁴

5. Tasamuh Dalam Berpolitik

Natsir juga merupakan seorang muslim yang toleran. Cara pandangya terhadap toleransi sangatlah maju, jernih, dan moderat. Dengan berbekal keyakinan atas kebenaran tauhid, menurutnya seorang Muslim, tidak boleh tidak, harus mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sehari-hari. Perbedaan tentang ibadah dan agama tidak boleh menyebabkan putus-asanya seorang Muslim di dalam mencari titik persamaan di dalam agama-agama. Oleh karena itu, seorang Muslim diwajibkan mengambil inisiatif dalam menjernihkan kehidupan antar-agama, sesuai dengan pedoman al-Qur'an:

“Wahai Ahli Kitab, marilah bersama-sama berpegang kepada kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita

³⁴ Samsuri, “Komunisme Dalam Pergumulan Wacana Ideologi Masyumi,” *Millah Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2001): 99–121, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/millah.vol1.iss1.art8>.

tidak akan sembah selain Allah dan kita akan mempersekutukannya dengan sesuatu jua” (Q.S. Ali Imran: 64).³⁵

Berangkat dari semangat ajaran al-Qur’an di atas, dalam diri seorang Muslim harus memancarkan jiwa *tasamuh* dan toleransi orang lain yang berbeda agama sekalipun. Islam juga mengajarkan prinsip untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak orang lain dalam beragama; bahkan, jika ada hak-haknya yang tertindas, seorang Muslim wajib membela – kalau perlu mempertahankan jiwanya.³⁶ Inilah spirit agama Islam yang diyakini oleh Natsir. Konsep hidup saling berdampingan yang penuh dengan toleransi adalah konsep yang tidak terelakkan menurut Natsir. Menurutnya, jika kita hendak menjamin kemerdekaan agama dan menegakkan kejernihan hidup antar-agama di tengah-tengah 80 juta penduduk Indonesia (menujuk pada perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada konteks saat itu tahun 1954), maka tidak ada pemecahan lain, menurutnya, selain “memesrakan paham tersebut dan meluaskan paham itu dalam kepulauan Indonesia yang indah dan permai ini”³⁷. Dengan demikian, Natsir memahami bahwa toleransi adalah nilai-nilai yang *embedded* dalam sikap hidup seorang Muslim.

Sikap seperti ini terlihat dari beberapa peristiwa, seperti hubungan dia dengan Soekarno. Bermusuhan tapi bersahabat, adalah prototipe seorang Natsir sebagai negarawan dalam berhubungan dengan Soekarno. Meski terjadi perbedaan pandangan yang tajam antara mereka terkait dengan ideologi Pancasila dan Islam, juga pernah mengalami pengucilan politik semasa kekuasaan Soekarno --bahkan Partai Masyumi yang dipimpinnnya dibubarkan pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno pada 1960; Natsir tidak pernah menjelek-jelekkkan Soekarno.³⁸ Perbedaan pandangan Natsir dengan Soekarno yang sudah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka pada 1930, tidak menghalangi hubungan dekat keduanya. Begitu dekatnya sehingga Natsir juga pernah menjadi pembuat pidato Soekarno.

Natsir pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dan bahkan menduduki posisi wakil ketua. Ia adalah juga Menteri

³⁵ Natsir, *Capita Selecta I*.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lihat Mohammad Natsir, “Keragaman Hidup Antar Agama,” *Hikmah* (Jakarta, 1954).

³⁸ Lihat kesaksian Chris Siner Key Timu dalam Bachtiar Chamsyah, ed., *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai Dengan Sejarah* (Jakarta: Republika, 2008).

Penerangan pertama dalam sejarah Republik Indonesia pada masa Kabinet Sjahrir. Posisi yang sama berhasil dia pertahankan dalam dua periode kabinet sesudahnya, yakni Kabinet Hatta dan Kabinet Sjahrir jilid II. Setelah mengajukan “Mosi Integral Natsir” yang membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mengembalikan Republik Indonesia menjadi negara kesatuan pada Sidang Pleno Parlemen pada 3 April 1950 ia dipercaya oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Namun jabatan perdana menteri hanya sebentar dia emban (Agustus 1950 - April 1951), karena dia lalu mengundurkan diri setelah berselisih paham dengan Presiden Soekarno terkait dengan paham kenegaraan, antara Islam sebagai ideologi versus sekularisme.³⁹

Perselisihan paham dengan Soekarno semakin memuncak ketika Natsir bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Tuntutan PRRI untuk otonomi daerah yang luas diartikan pemerintah pusat sebagai pemberontakan menyebabkan ia dan tokoh-tokoh PRRI lainnya ditangkap dan dipenjarakan. Natsir menjalani tahanan politik di Malang dari tahun 1962-1964, sebelum akhirnya dibebaskan oleh Orde Baru pada Juli 1966. Sikap kritis Natsir tidak pernah surut, bersama dengan sejumlah tokoh sipil dan militer lainnya, dia mengkritik pemerintah Orde Baru melalui Petisi 50 pada 5 Mei 1980. Sikap ini membuatnya dicekal oleh pemerintah Soeharto hingga meninggal pada 6 Februari 1993 dalam usia 84 tahun.⁴⁰

E. Moderatisme Politik Natsir: Respon Terhadap Pancasila

Sebagai seorang Muslim-modernis pandangan Natsir mengenai Pancasila sebagai dasar negara sungguh sangat menarik. Meskipun Pancasila bukanlah Islam, Natsir mengintrodusir titik temu di antara keduanya di dalam berbagai kesempatan pada kurun waktu 1952-1954. Selanjutnya, terjadi fase yang penting dalam pemikiran Natsir karena pandangannya terhadap Pancasila yang berubah dalam sidang-sidang konstituante pada kurun waktu 1957-1959.

Awalnya, Natsir adalah pembela Pancasila yang fasih dengan menyebutnya sebagai konsep identik dengan Islam. Dalam sebuah pidato di Karachi Pakistan pada 9 april 1952 yang diberinya judul “Sumbangan Islam

³⁹ Lukman Hakiem, *Merawat Indonesia: Belajar Dari Tokoh Dan Peristiwa* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 85–92; Tempo, *Natsir: Politik Santun Di Antara Dua Rezim*.

⁴⁰ Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa* (Bandung: Mizan, 2001).

bagi Perdamaian Dunia”, ia antara lain menyatakan bahwa Indonesia -- meskipun berbeda dengan Pakistan, adalah negara Islam. Mengapa? Karena Islam diakui sebagai agama dan panutan jiwa bangsa Indonesia meskipun tidak disebutkan di dalam konstitusi bahwa Islam adalah negara agama. Menurutnya, Indonesia juga tidak memisahkan agama dari masalah kenegaraan. Dengan tegas Indonesia menyatakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi tiang pertama Pancasila, kaidah yang dianut sebagai dasar ruhani, akhlak dan susila oleh negara dan bangsa Indonesia.

Penegasan kaitan agama sebagai dasar negara penting, karena sebagai dasar negara yang termuat dalam konstitusi negara harus bertolak dari pokok pikiran yang menempatkan negara dalam hubungan yang seerat-eratnya dengan masyarakat yang hidup di dalamnya. Menurut Natsir, konstitusi negara itu haruslah berurat dan berakar dalam kalbu rakyat Indonesia --menyangkut akal pikiran, perasaan, kepercayaan serta falsafah hidup rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dasar negara yang tidak memenuhi syarat yang demikian, akan menjadikan negara mudah terombang-ambing, labil dan tidak duduk di atas sendi-sendi yang pokok. Dasar atau fondasi itu tak lain adalah ajaran Islam, sebagai sendi pokok umat mayoritas yang ada di Indonesia ⁴¹.

Dalam Majalah *Hikmah* edisi 29 Mei 1954 Natsir, dengan menggunakan pertanyaan retorik, menulis: “Apakah Pancasila bertentangan dengan Ajaran al-Qur’an?” sebagai judulnya, ia menjelaskan bahwa Pancasila adalah hasil musyawarah para pemimpin bangsa yang di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin Islam. Dia percaya, mereka pastilah tidak akan membenarkan suatu perumusan yang bertentangan dengan asas dan ajaran Islam. Natsir menguraikan kelima sila Pancasila dengan mengaitkannya dengan spirit ajaran Islam sebagai berikut: ⁴²

- 1) Apakah mungkin al-Qur’an yang memancarkan tauhid dapat apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?
- 2) Apakah mungkin al-Qur’an yang memancarkan tauhid dapat apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?
- 3) Bagaimana mungkin al-Qur’an yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan *‘adalah ijtima’iyah* bisa apriori bertentangan dengan Keadilan Sosial?

⁴¹ Mohammad Natsir, *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2001), 198–200.

⁴² Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*.

- 4) Bagaimana mungkin yang justru memberantas sistem feodal dan pemerintahan *istibdad* (diktator) sewenang-wenang, serta meletakkan dasar masyarakat dalam susunan pemerintahan, dapat apriori bertentangan dengan apa yang dinamakan Kedaulatan Rakyat?
- 5) Bagaimana mungkin al-Qur'an yang menegakkan istilah *islahu bainan nas* (damai antara manusia) sebagai dasar-dasar yang pokok yang harus ditegakkan oleh umat Islam, dapat apriori bertentangan dengan ajaran Perikemanusiaan?
- 6) Bagaimana mungkin al-Qur'an yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, apriori dapat dikatakan bertentangan dengan Kebangsaan?

Natsir sangat yakin dengan Pancasila sebagai dasar negara, kehidupan ummat Islam akan terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara sekaligus sebagai seorang muslim karena kandungan Pancasila tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan ajaran al-Qur'an. Demikian juga sebaliknya, Pancasila akan tumbuh dan berkembang di bawah naungan Islam. Dengan demikian, umat Islam dapat menerima Pancasila secara meyakinkan.

Pandangan Natsir tentang Pancasila berubah tiga tahun kemudian dalam sidang-sidang Konstituante. Ia justru menyampaikan pandangan "Islam sebagai dasar negara" yang menghendaki penggantian Pancasila sebagai dasar negara dengan Islam. Sikap ini dipicu oleh dua alasan. Pertama, Natsir melihat bahwa Pancasila cenderung "dilegitimasi" oleh para nasionalis sekuler sebagai sistem yang sekuler. Kedua, Pancasila dan UUD 1945 yang sudah ditetapkan sejauh ini masih bersifat darurat sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno pada Sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sidang Konstituante merupakan tempat dan satu-satunya kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan dasar negara yang cocok sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam.⁴³

Pandangan Natsir ini kemudian menyulut perbedaan yang runcing dengan para pemikir politik dari kalangan nasionalis sekuler terutama Soekarno dan mengakibatkan kebuntuan di Konstituante. Kebuntuan terjadi karena polarisasi pendapat terkait dengan ide dasar negara: antara Islam dan Pancasila. Konteks politik saat itu, aspirasi politik yang mendukung dasar negara Pancasila mencapai 52%, sementara Konstituante

⁴³ Natsir.

membutuhkan 2/3 (atau minimal 67% suara) untuk menghasilkan keputusan. Ketika Konstituante sedang memasuki masa reses dan para pemimpin fraksi dari kedua kubu sedang berunding mencari jalan kompromi, tiba-tiba Presiden Soekarno menghentikan persidangan Konstituante dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 dengan menyatakan bahwa Piagam Jakarta merupakan jiwa dan bagian tak terpisahkan dari konstitusi tersebut.

Sikap Natsir yang integralis namun modernis-moderat tersebut terwujud dari proses hidup yang panjang dalam dua lingkungan yang berbeda. Di satu sisi negarawan yang lahir di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908 itu dididik dan dibina dalam lingkungan agamis yang menekankan nilai-nilai Islam, dan di sisi lain, dia pernah menyerap nilai-nilai modern dari pendidikan model Belanda. Hidup di dua alam yang berbeda ini telah dialami Natsir semenjak kecil. Ayah Natsir, Idris Sutan Saripado, adalah seorang Asisten Demang di Bonjol, jabatan yang relatif “rendahan” untuk pegawai pemerintahan. Sementara kakeknya adalah seorang ulama. Lahir dan dibesarkan dari keluarga yang agamis memberi pengaruh besar pada pemikiran dan aktivitas politiknya. Natsir adalah juga seorang pemangku adat untuk masyarakat di kampungnya dengan gelar Datuk Sinaro Panjang.⁴⁴

Natsir juga mengenyam pendidikan di dua model pendidikan yang berbeda: pendidikan agama (Islam) yang diperkaya oleh aktivitasnya di pergerakan Islam, dan pendidikan modern Belanda. Pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) di Maninjau, tetapi hanya sampai kelas dua karena setelah itu ia pindah ke *Holland Inlandse School (HIS)* Adabiyah, sebuah sekolah swasta yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi, di Padang Panjang. Selain bersekolah di HIS pagi hari, Natsir juga belajar di madrasah diniyah di sore hari, di sini ia mempelajari dasar-dasar ilmu agama dan Bahasa Arab. Selepas dari HIS, ia mendapatkan beasiswa dari *Meer Uitgebreid Lager Orderwijs (MULO)* di Padang. Ketika bersekolah di MULO ituah Natsir mulai aktif berorganisasi. Mula-mula ia masuk Serikat Pemuda Sumatera (*Jong Sumatranen Bond*) yang dipimpin oleh Sanusi Pane, kemudian bergabung dengan Serikat Pemuda Islam (*Jong Islamieten Bond*) yang juga Sanusi Pane sebagai ketuanya. Ia juga aktif dalam kegiatan

⁴⁴ Tempo, *Natsir: Politik Santun Di Antara Dua Rezim*; Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*.

kepanduan Islam, yakni Pandu *Nationale Islamietische Pavinderij (Natipij)*.

45

Di dalam organisasi yang diikutinya, bakat kepemimpinan Natsir sangat menonjol. Ia juga dikenal memiliki kecapakan organisasi yang lebih menonjol dari kebanyakan anggota-anggotanya. Natsir muda semakin berkembang ketika bersekolah di *Algemme Middelbare School (AMS)* di Bandung. Di sinilah ia berjumpa dengan A. Hassan yang merupakan tokoh pendiri Persatuan Islam (Persis) – sebuah organisasi Islam modernis yang relatif militan dalam membela prinsip-prinsip Islam. Ia berguru kepada A. Hassan dengan mempelajari agama secara mendalam dan mulai terlibat dalam gerakan di bidang pendidikan, dakwah, dan politik. Bersama A. Hassan ia mengelola majalah *Panji Islam* untuk mengembangkan dakwah dan pemikiran-pemikiran Islam modern melalui media yang dikelolanya itu.⁴⁶

Aktivitas organisasi sangatlah besar andilnya dalam menentukan perjalanan hidup seorang Natsir. Ia tumbuh menjadi pemimpin di berbagai organisasi yang digelutinya, baik itu di bidang pendidikan, dakwah Islam, atau politik. Di bidang pendidikan ia memimpin sebuah perkumpulan yang dinamainya Pendidikan Islam (Pendis) untuk memajukan sistem pendidikan Islam. Ia memimpin lembaga ini pada 1932-1942, melahirkan sejumlah lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai dari TK, HIS, MULO, dan sekolah-sekolah kejuruan serta kursus-kursus. Natsir adalah juga salah seorang tokoh kunci di balik pendirian Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta, yang kemudian kita kenal sebagai Universitas Islam Indonesia (UII) sekarang. Selain itu, Pendis yang dipimpinnya juga melahirkan Universitas Islam Bandung (Unisba)⁴⁷.

Selain berguru kepada A. Hasan, Natsir juga bergaul dengan pemikir-pemikir Islam seperti Agus Salim, Syekh Ahmad Soorkati, HOS Cokroaminoto dan A.M. Sangaji. Mereka adalah tokoh-tokoh Islam terkemuka pada waktu itu yang terpengaruh oleh pemikiran Mohammad Abduh di Mesir. Dengan Salim misalnya, ia kerap bertukar pikiran tentang

⁴⁵ Faisal Basri and Haris Munandar, *Untuk Republik* (Jakarta: IRSA Press, 2019), 268.

⁴⁶ Pepen Irpan Fauzan, Ahmad Khoirul Fata, and Gun Gun Abdul Basit, "Pola Kaderisasi Gerakan Islam Puritan: Studi Kritis Atas Persatuan Islam," *Millah: Jurnal Studi Agama* 19, no. 2 (2020): 247–78; Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*; Basri and Munandar, *Untuk Republik*.

⁴⁷ Tempo, *Natsir: Politik Santun Di Antara Dua Rezim*.

hubungan Islam dan negara. Hal ini banyak mempengaruhi pandangan-pandangan politiknya.⁴⁸ Karir Natsir di bidang politik juga sangat cemerlang. Mula-mula ia aktif di Partai Islam Indonesia (PII) sebagai Ketua Cabang Bandung (1938-1942), lalu bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) yang kemudian berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan menjadi ketuanya, sejak tahun 1945 hingga Masyumi dibubarkan oleh rezim Soekarno pada 1960.

Ciri pemikiran dan pandangan politik Natsir yang tegas tetapi tetap menempuh cara-cara konstitusional merupakan sikap politik yang patut mendapatkan apresiasi. Dalam situasi krisis politik, ideologi, dan hukum yang tidak menentu pada masa itu, ada tokoh-tokoh yang mengobarkan perlawanan bersenjata dalam menyikapi perbedaan terhadap pemerintah Pusat seperti yang dilakukan oleh Kartosuwirjo melalui Darul Islam (DI) di Jawa Barat dan Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh. Namun tidak demikian halnya dengan Mohammad Natsir. Dia lebih bertahan dengan perjuangan konstitusional di parlemen sampai akhirnya Konstituante dibubarkan pada 1959. Natsir memilih jalur moderat non kekerasan fisik sebagai pilihan perjuangan politiknya, meskipun sama-sama mengusung ideologi politik Islam.

Memang, Natsir sempat bergabung dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) ketika perselisihannya dengan Soekarno memuncak. Tetapi gerakan PRRI lebih fokus kepada tuntutan untuk tercapainya otonomi daerah yang luas, meskipun kemudian lalu diartikan sebagai pemberontakan oleh Pemerintah Pusat. Akibat dari sikap dan pandangan politik yang berbeda dengan Pemerintahan Soekarno ini menyebabkan ia dan tokoh-tokoh PRRI lainnya ditangkap dan dipenjarakan, dan baru dibebaskan pada masa Orde Baru pada Juli 1966.

Begitulah Natsir. Ia dikenang sebagai politisi yang santun. Perbedaan pendapat dengan lawan politik tidak melanggengkan sikap saling dendam. Natsir tetap menganggap lawan politiknya sebagai teman. Natsir adalah simbol dari pribadi yang jenius dan bersahaja. Hingga akhir hayatnya, ia bahkan tidak memiliki rumah tinggal dan harus berpindah-pindah kontrakan. Padahal, ia adalah bekas pejabat sekelas Perdana Menteri. Karena keteladannya itulah, Indonesia kehilangan seorang tokoh besar ketika Natsir wafat. Kehilangan tak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. "Wafatnya PM Natsir bagi kami seperti sebuah musibah yang lebih

⁴⁸ Tempo.

besar dari jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima...,” kata Takeo Fukuda, Perdana Menteri Jepang saat mengungkapkan pernyataan belasungkawa.⁴⁹

F. Penutup

Pemikiran Natsir yang mengusung gagasan integrasi Islam dengan negara dan penerimaannya pada ide dan lembaga politik modern menjadi bukti yang memfalsifikasi kesimpulan yang selama ini berkembang tentang absolutisme dalam gagasan integrasi agama-negara. Gagasan Natsir selaku salah satu peletak dasar cita-cita ideologi politik Islam di Indonesia secara nyata mengungkapkan bahwa seorang Muslim bisa memeluk keyakinannya secara kafah dan di saat bersamaan menjadi pribadi yang modern.

Namun demikian, gagasan dan tindakan politik Natsir bukanlah sebuah produk sekali jadi. Ia adalah sebuah proses yang terus terasah oleh gesekan ide-ide dan realitas sejarah yang ada. Maka wajar bila dalam gagasan dan aksi politik Natsir terdapat *shifting* yang mengejutkan terutama dalam polemik terkait Pancasila sebagai dasar negara, dikarenakan konteks politik Indonesia yang juga berkembang. Terlepas dari itu semua, jelas bahwa mozaik pemikiran dan aksi-aksi politik Natsir telah memberikan sumbangan yang berharga bagi perpolitikan Indonesia, khususnya bagi gerakan politik umat Islam modern. [.]

Daftar Rujukan

- Abdillah, Masykuri. “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 249.
- Amin, Suyitno. “Konsepsi Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dari Perspektif Pemikiran Politik Islam.” *Intizar* 21, no. 225–246 (2015).
- Assyaukanie, Luthfie. *Ideologi Islam Dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi*. Jakarta: Prenada & PPIM UIN Jakarta, 2016.
- Basri, Faisal, and Haris Munandar. *Untuk Republik*. Jakarta: IRSA Press, 2019.

⁴⁹ Noer, *Membicarakan Tokoh-Tokoh Bangsa*.

- Chamsyah, Bachtiar, ed. *100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai Dengan Sejarah*. Jakarta: Republika, 2008.
- Djaini, Abibullah. "Pengantar." In *Pemikiran Dan Perjuangan Muhammad Natsir*, edited by Anwar Harjono. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Fata, Ahmad Khoirul, and Siti Mahmudah Noorhayati. "Sekularisme Dan Tantangan Pemikiran Islam Kontemporer." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 20, no. 2 (2016): 215–28. <https://doi.org/10.29300/MADANIA.V20I2.180>.
- Fauzan, Pepen Irpan. *Negara Pancasila Vis a Vis Negara Islam: Pemikiran Politik M Natsir Dan M Isa Anshary (1945-1960)*. Garut: STAIPI Garut Press, 2019.
- Fauzan, Pepen Irpan, and Ahmad Khoirul Fata. "Portraying Political Polarization in Persatuan Islam in the Case of Mohamad Natsir Vs Isa Anshari." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 3, no. 2 (2019): 78. <https://doi.org/10.30821/jcims.v3i2.5589>.
- Fauzan, Pepen Irpan, Ahmad Khoirul Fata, and Gun Gun Abdul Basit. "Pola Kaderisasi Gerakan Islam Puritan: Studi Kritis Atas Persatuan Islam." *Millah: Jurnal Studi Agama* 19, no. 2 (2020): 247–78.
- Feith, Herbert, and Lance Castles. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Hakim, Lukman. *Merawat Indonesia: Belajar Dari Tokoh Dan Peristiwa*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Modernisasi Islam Dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir." *Islamika* Januari-Ma, no. 3 (1994).
- Muliati, Indah. "Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam." *Tingkap* 11, no. 2 (2015): 129–39.
- Natsir, Mohammad. *Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- . *Capita Selecta I*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- . *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Sega Arsy, 2014.
- . "Keragaman Hidup Antar Agama." *Hikmah*. Jakarta, 1954.
- Noer, Deliar. *Membicarakan Tokoh-Tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan, 2001.

- Samsuri. "Komunisme Dalam Pergumulan Wacana Ideologi Masyumi." *Millah Jurnal Studi Agama* 1, no. 1 (2001): 99–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/millah.vol1.iss1.art8>.
- Setyaningsih, Emi. "Perjuangan Dan Pemikiran Politik Mohammad Natsir (1907-1993)." *Jurnal Tapis* 16, no. 2 (2016): 73–94.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Syamsuddin, M Din. "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam." *Ulumul Qur'an* 4, no. 2 (1993).
- Tempo, Tim. *Natsir: Politik Santun Di Antara Dua Rezim*. Jakarta: Tempo & KPG, 2011.